

# PENGARUH TERTIP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA TERNADAP PEMBANGUNAN DESA

Sebagai salah seorang pengaruh tertip Administrasi Pemerintahan Desa  
terhadap peningkatan hasil pertanian di Desa Mestik, Desa Penggenan,  
Desa Turahan Kecamatan Larangan Kabupaten Lamongan  
Tingkat D. Pamekasan.

## SKRIPSI

Diojukan untuk melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat  
guna mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara  
(Public Administration)

Disusun Oleh :

*Syamsiyah*

NRM : 84.7 048.15011.01650



UNIVERSITAS MADURA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PAMEKASAN  
1990

TANDA PERSetujuan

J u d u l : PENGARUH TERATIP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
DESA TERHADAP PERKEMBANGAN DESA

Sub judul : Suatu studi tentang Pengaruh Teratip Admi-  
-nistrasi pemerintahan desa terhadap pering-  
katan hasil pertanian di desa Nontok, desa  
Perungguan, desa Terahan Kecamatan Larangan  
Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan.

Di susun oleh : N y a m s i y a h

N i s a b e n : 84.7.048.15011.01650

Nomer Pokok : 843413

Universitas : M A D U R A

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Pagra

Program Studi : Strata Satu (S1)

Pasuruan,

1990

Di setuju oleh,  
Dosen Pembimbing I

Di setuju oleh,  
Dosen Pembimbing II

Ir. Hardiono, MPA.

Ir. Alast Paryono

BAB I  
PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUNGK

Demasa ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor untuk mewujudkan cita-cita Negara. Cita-cita itu tentu mempunyai fungsi sebagai penentu di dalam mengatur dan memelihara kelangkaan hidup bangsa dengan menggerakkan bahan perkembangan jaman, sehingga meningkatnya kebutuhan masyarakat dewasa ini baik kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan merupakan suatu proses yang di lakukan secara sadar untuk merubah keadaan yang di anggap terbelakang atau yang di anggap kurang maju untuk di jadikan atau dalam keadaan yang lebih baik. Seperti yang di sebutkan di dalam Garis-garis Besar Keluaran Negara (GBKN) adalah :

"Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan, berdaulat, beraturan dan berkedaulatan rakyat di dalam kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan serius serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai". 1)

---

1. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 Tentang Garis-garis Besar Keluaran Negara, penerbit, Aras Data Jaya, hal. 9

Kalau kita berfikir lebih jauh tentang tujuan dan bakat pembangunan Nasional ini, adalah berarti bahwa pembangunan Nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan badaniah saja melainkan keselarasan, kesegian dan keseimbangan antara bidang materiil dan spiritual. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan salah satu faktor penting adalah Tertib Administrasi pemerintahan dan peranan masyarakat sangat membantu terhadap pelaksanaan pembangunan.

Sejalan dengan fokus pembangunan yang di titik beratkan pada daerah pedesaan, maka perlu di perhatikan adanya pelaksanaan Administrasi secara baik. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara atau dalam ketetapan MPR IV/MPR/78 menyatakan bahwa:

"Perlu di susun Undang-undang tentang pembangunan desa, karena adanya Undang-undang tentang pemerintahan desa akan memperkuat pemerintahan desa, agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasi pasifnya dalam pembangunan dan menyelenggarakan Administrasi desa yang makin seluas dan efektif". 2)

Kalau menganalisa lebih jauh dari pendapat di atas memang perlu adanya pembastan atau penyusunan Undang-undang di dalam pemerintahan desa supaya pemerintahan desa lebih mudah menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong

---

2. K. Hertjik Maloh, Tertib Pemerintahan Desa dan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Obelia Indonesia, Jakarta, 1964, hal. 8

atau berpartisipasi. Sebab dasar pedesaan merupakan tonggak dari segala kegiatan pembangunan khususnya di bidang pertanian yang menjadi harapan dari banyak masyarakat yang ada di pedesaan.

Pedesaan merupakan sumber dari segala kegiatan pembangunan baik itu merupakan proyek besar atau proyek kecil, khususnya pada dasarnya di arahkan dan berlokasi di daerah pedesaan, karena itu pembangunan pedesaan khususnya di bidang pertanian tidak mungkin mampu di laksanakan oleh satu pihak saja, tanpa koordinasi dengan semua pihak.

Seperti pendapat dari H. Saenudin sebagai berikut :

"Petani sebenarnya tidak bodoh, seorang penyuluh jangan menganggap mereka patung, seperti halnya seorang pemain sandiwara yang menganggap penonton itu sebagai patung atau kera, yang tidak bisa apa-apa atau tidak bisa memberi komentar pada saat ia berprestasi. Petani setiap saat terus berkembang dan serba kritis, tahu mana yang di perlukan dan mana yang tidak". 3)

Salah satu hal yang perlu di perhatikan dalam penyuluhan adalah masalah peningkatan pertanian di pedesaan dan kualitas dari usaha tani. Untuk meningkatkan hasil pertanian tersebut dapat di lakukan dengan berbagai cara antara lain :

---

3. Saenudin H., Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian, Bina Cipta, Bandung 1977, hal.44

- a. Memberikan penyuluhan secara menyeluruh pada masyarakat petani.
- b. Memberikan bantuan sarana-sarana atau alat-alat pertanian.
- c. Pembinaan Administrasi Desa.
- d. Dan pembinaan tenaga-tenaga ahli yaitu:
  - Di bidang Administrasi
  - Di bidang pertanian

Dalam hal tersebut di atas bisa terlaksana dengan baik apabila di dukung dengan adanya Tertip Administrasi - pemerintahan desa, dengan demikian segala rencana atau program akan berjalan lancar.

Dari semua itu di atas penulis terdorong untuk mengadakan studi tentang **PENGARUH TERBUTIP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA TERHADAP KEMERDEKAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA**. Pembangunan tersebut yakni dalam peningkatan hasil pertanian masyarakat desa yaitu di desa Kertok, Desa Peraguan, dan Desa Taraban.

Dengan penulisan skripsi ini di harapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan desa dalam pelaksanaan pembangunan.